

# MAJALAH SUARA PASURUAN



MAJALAH BULANAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN  
PASURUAN

■ KREATIF ■ DINAMIS ■ ASPIRATIF

EDISI JULI 2024 | MINGGU 4



**Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto Raih  
Penghargaan Anubhawa Sasana  
Desa/Kelurahan 2024**





Cover : Pj. Bupati Pasuruan,  
Andriyanto Raih  
Penghargaan Anubhawa  
Sasana  
Desa/Kelurahan 2024.

Foto : Martin

**IJIN TERBIT :**

2479/ Dirjen PPG/ STT/ 1998

**PENERBIT :**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Pasuruan

**PELINDUNG/PENASEHAT :**

Bupati Pasuruan / Wakil Bupati Pasuruan

**PEMBINA :**

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan

**PENANGGUNG JAWAB :**

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

**PEMIMPIN REDAKSI :**

Arifin

**REDAKTUR PELAKSANA :**

Heni Nurhayati

Akhmad Rohim

Diyah Bayu Ratna

**SEKRETARIS REDAKSI :**

Maria Ulfa

**REDAKSI :**

Emil Akbar, Dewi Gita Puspitasari, Ilmi Zamzam,  
Eka Rosmida Oktavia, Yuni Setiono, Achmad  
Fatchur Rozaq, Achmad Chusaeri, Ahmad Efendi,  
M. Indra, Robiatul Adaweyah, M. Yusuf

**LAYOUT :**

Yudhi Dharma

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Raya Raci Km9 Kecamatan Bangil  
Kabupaten Pasuruan Telp. (0343) 429064

**E-mail:**

diskominfo@pasuruankab.go.id

EDITORIAL

## KURMA PARK “WISATA HALAL” KABUPATEN PASURUAN

Untuk kedua kalinya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Kali ini, Menteri yang juga seorang pengusaha itu berkunjung ke Kurma Park di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo untuk menghadiri acara "Diskusi Bareng Komunitas (Di BaTas)", Sabtu (27/7/2024).

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan 107 FM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan kembali menoreh prestasi di Tingkat Nasional sebagai Nomine Lembaga Penyiaran Peduli Anak pada Anugerah Penyiaran Anak Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Prestasi lainnya datang dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang memberikan Penghargaan "Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan" kepada Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto. Penghargaan ini diberikan kepada Pj. Bupati Pasuruan yang telah membina dan mengukuhkan desa-desa/kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH).

Sementara itu, Per 25 Juni 2024 lalu, Kabupaten Pasuruan sudah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh desa/kelurahan. Saat verifikasi, semua persyaratan sebuah daerah untuk menuju ODF sudah dilengkapi Pemkab Pasuruan. Termasuk program jambanisasi, kampanye perilaku hidup sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) hingga perilaku masyarakat ditambah tatanan yang diterapkan di tempat ibadah, sekolah dan tempat lain yang sesuai kriteria ODF.(dgp)

# 65 Kasus Kekerasan Anak Selama 6 Bulan. Pemkab Pasuruan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga

Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Pasuruan cukup banyak. Bahkan hampir mendekati jumlah kasus selama satu tahun di 2023 kemarin.

Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan, setidaknya sudah ada 65 kasus kekerasan anak yang terjadi sejak Januari-Juni kemarin.

Puluhan kasus tersebut tak lagi didominasi *bullying*, namun

kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan, M. Agus Mashadi mengatakan, kekerasan seksual anak mendominasi kasus hingga 60 persen. Pelakunya bukan orang jauh, melainkan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

"Bisa paman korban, ayah tiri korban dan pelaku yang bertempat tinggal tak jauh dari rumah korban. Rata-rata pelaku kekerasan seksual ya orang terdekat korban," kata Agus saat ditemui di ruangannya, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskannya, 65 kasus kekerasan anak selama enam bulan terakhir, jumlahnya hampir mendekati total kasus selama Tahun 2023, yakni 74 kasus. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ada potensi peningkatan tren kasus yang lebih tinggi jumlahnya bila dibanding tahun 2023 kemarin.

"Ya kalau dilihat dari total kasus selama enam bulan ini dengan total kasus di tahun 2023, sepertinya ada potensi kenaikan kasus meski kita berdoa mudah-mudahan semakin menurun hingga di akhir tahun," jelasnya.

Tingginya kasus kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan menurut Agus disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya pemahaman orang tua untuk menjaga putra putrinya saat keluar rumah. Belum lagi faktor psikologi pelaku yang mengalami *traumatic healing* lantaran pernah menjadi korban semasa kecilnya.

"Macam-macam faktornya. Kebanyakan karena lingkungan yang kurang baik, sehingga anak-anak jadi korban," jelasnya.

Dengan masih banyaknya kasus kekerasan pada anak, Agus menghimbau kepada para orang tua agar betul-betul menjaga ketahanan keluarga dengan sangat baik.

"Karena intinya adalah ketahanan keluarga. Kalau sudah dijaga dengan baik, Insya Allah anak-anak akan terhindar dari kekerasan fisik dan seksual," himbaunya. (emil)



Pembekalan dan arahan untuk siswa siswi saat mengikuti kegiatan MPLS.





Penyerahan berita acara Raperda oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan kepada Pj. Bupati Pasuruan.

## Raperda RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 Disahkan Jadi Perda

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2025-2045 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan Raperda tersebut ditandai penandatanganan berita acara serta penyerahan berita acara oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan kepada Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (22/7/2024) siang.

Pantauan di lapangan, seluruh anggota parlemen daerah sepakat untuk *register* rancangan peraturan daerah itu menjadi perda baru.

"Kami tawarkan kepada peserta sidang paripurna, apakah rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 disetujui untuk ditetapkan," tanya Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebelumnya, Ketua Pansus RPJPD H. Arifin menyampaikan laporan kerja pansus yang melalui proses komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Laporan tersebut menjadi salah satu

acuan penting dalam penyempurnaan Raperda tersebut.

Sedikitnya, ada 18 poin utama hasil pembahasan pansus. Antara lain penguatan kearifan lokal, pengembangan bumdes, transformasi digital, penanganan dampak perceraian, peningkatan kapasitas ASN. Adapula penerapan UHC, penambahan sekolah baru, pengelolaan tanah kas desa, perbaikan kualitas jalan, dan pengelolaan sumber daya air.

Arifin juga menyebut pentingnya penambahan pos damkar, pengembangan Bangil sebagai pusat ekonomi, dan penyelesaian masalah di kawasan militer.

"Yang tidak kalah penting adalah pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama, termasuk penegakan hukum lingkungan, perlindungan kawasan konservasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan," ucapnya.

Disamping itu, pihaknya juga menyarankan pembagian kewenangan yang jelas. Antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Khususnya dalam pengelolaan infrastruktur sungai, jalan, dan lainnya, akan diperjelas. Sehingga ketika terjadi masalah tidak saling tunggu.

"RPJPD ini juga akan fokus pada penyediaan hunian layak, penguatan kerjasama antar daerah, dan percepatan program pengendalian banjir", bebernya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto mengatakan, pemerintah akan segera menyodorkan hasil pembahasan raperda itu ke pemprov. Sehingga akan dilakukan evaluasi di tingkat provinsi. Ia juga lega lantaran pembahasan raperda RPJPD rampung lebih cepat.

"RPJPD 2025 2045 ini adalah pedoman kepala daerah mendatang untuk melahirkan visi dan misi," bebernya. (emil)



# Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Turun Signifikan. Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto Tegaskan 3 Hal Penting Wajib Dilakukan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan mencatat angka kemiskinan di Kabupaten pada Maret 2024 turun menjadi 144,84 ribu orang. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mencapai 154.09 ribu atau 9,24 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan di tahun ini, persentasenya lebih kecil, yakni 8,63 persen.

Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa indikator. Utamanya adalah program Pemerintah Daerah yang fokus pada tiga hal penting.

Pertama, penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan jaminan perlindungan sosial. Menurutnya, bansos yang diberikan kepada masyarakat miskin diberikan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Bahkan juga *diback-up* oleh APBD Provinsi maupun APBN.

Begitu pula untuk jaminan perlindungan sosial, hampir 100 persen dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan sudah tercover BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), serta bantuan pangan yang bisa menjadi barrier atau penyangga kebutuhan sehari-hari warga kurang mampu.

"Termasuk beberapa bantuan yang diperuntukkan untuk dunia pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD dan SMP juga terus diberikan. Kalau Bansos sudah banyak sekali untuk keluarga penerima manfaat (KPM) miskin, bahkan rentan miskin dan miskin ekstrim jadi perhatian pemerintah," kata Andriyanto di sela-sela

Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto blusukan pantau harga pangan di pasar.



kesibukannya, Rabu (24/7/2024).

Kedua adalah peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat. Baik UKM maupun UMK dan sektor unggulan lainnya. Kata Andriyanto, Pemerintah Daerah melalui beberapa OPD terkait memiliki program dan kegiatan yang mengarah pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan program kewirausahaan.

"Bantuan permodalan, pembinaan dan pendampingan sampai pelatihan kewirausahaan terus ada. *Outputnya* tentu saja membuat warga kurang mampu menjadi mandiri meski perlahan demi perlahan. Tapi membuat mereka jadi berdaya, punya *skill* dan akhirnya tidak lagi tergantung pada pemerintah," jelasnya.

Program ketiga yakni pengurangan jumlah kantong kemiskinan, khususnya di wilayah timur dan kantong-kantong kemiskinan lainnya. Menurut Andriyanto, untuk menguranginya, beberapa program yang menyentuh hingga ke lapisan dasar diantaranya pembangunan infrastruktur di wilayah yang butuh percepatan pembangunan.

Dari situlah, maka sudah pasti akan diikuti dengan perputaran perekonomian yang tercipta dengan sendirinya. Sehingga Pemda tinggal memberikan sentuhan terakhir seperti mengadakan *event* besar, promosi hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

"Kalau perputaran ekonomi sudah tercipta dan bagus, maka pemda tinggal memberikan sentuhan terakhir saja. Kita bikin *event* di situ, kita ramaikan, kita bangun infrastruktur dan sarana prasarana publik, selanjutnya tinggal mereka yang harus berdaya sendiri," tegasnya.

Dari ketiga program yang dilakukan, penyaluran bansos terbukti memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebab sedikit banyak masyarakat miskin menjadi ketergantungan akan bansos.

Ditegaskan Andriyanto, ketika tidak ada supporting bansos, maka kondisi warga kurang mampu menjadi rentan miskin, bahkan sangat miskin dan miskin ekstrim.

"Istilahnya dengan bansos dari Pemerintah, warga miskin punya penyangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehingga kebutuhan lainnya bisa *discover* oleh pendapatan yang lain," tutupnya. (emil)

# Polres Pasuruan Gelar Sispamkota, Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto Yakini Pilkada Kabupaten Pasuruan Kondusif

Dalam rangka mengamankan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan 2024, Polres Pasuruan menggelar Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Kamis (25/7/2024).

Simulasi tersebut digelar di Halaman Mapolres Pasuruan dan disaksikan oleh Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, kemudian Wakapolres Pasuruan, Kompol Hari Azis; Komisioner KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pasuruan hingga undangan lainnya.

Pantauan di lapangan, simulasi melibatkan ratusan personel gabungan TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas hingga perwakilan tokoh masyarakat.

Selama satu jam lamanya, mereka mensimulasikan tata cara pengamanan yang dilakukan kepolisian dan keamanan lainnya. Khususnya saat keributan yang melibatkan dua kubu, terjadi.

Wakapolres Pasuruan, Kompol Hari Azis mengatakan, Sispamkota adalah salah satu aksi yang akan dilakukan jikalau terjadi kerusuhan dalam sebuah pesta demokrasi. Hanya saja, ia meyakini bahwa karakter masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah agamis dan semakin cerdas dalam menyikapi sebuah hal, termasuk Pemilihan Umum.

"Kalau potensi kerusuhan di manapun pasti ada. Tapi kalau warganya semuanya memahami apa itu pestra demokrasi, kami yakin tidak akan terjadi apa-apa," katanya.

Dalam simulasi ini, total ada 350 personel yang diterjunkan. Mereka berlatih selama 10 hari demi dapat menampilkan simulasi yang

Simulasi melibatkan ratusan personel gabungan TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas hingga perwakilan tokoh masyarakat.

maksimal. Kata Wakapolres, selain para petugas, beberapa peralatan betul-betul difungsikan sebagaimana mestinya. Seperti kendaraan *water canon* hingga kelengkapan petugas saat melakukan pengamanan.

"Persiapannya cuma 10 hari dan kita libatkan 350 personel gabungan TNI, POLRI, Linmas, Dishub dan perwakilan warga, dan alhamdulillah berjalan lancar," katanya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto mengacungi jempol Sispamkota yang dilakukan Polres Pasuruan.

"Nilainya seratus untuk keseriusan Polres Pasuruan menggelar Sispamkota, meskipun mereka berakting. Tapi bagus sekali," untkannya.

Hanya saja, ia berharap apa yang disimulasikan tidak terjadi dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan yang digelar secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

"Sispamkota dalam rangka mendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan betul-betul luar biasa. Namun saya berharap apa yang disimulasikan semoga tidak terjadi. Tidak ada unjuk rasa, penyusupan, protes, coblosan ulang, coblosan ganda, dan lainnya," harapnya. (emil)



Polres Pasuruan menggelar Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).





# Pemprov Jatim Acungi Jempol 10 Koperasi di Kabupaten Pasuruan Sudah Lakukan UKK

Untuk menilai pemahaman, kapasitas dan kemampuan tentang perkeroperasian, Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan sudah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi pengurus dan pengawas koperasi.

Di Kabupaten Pasuruan, jumlah koperasi yang sudah melaksanakan UKK bagi para pengurusnya sudah mencapai 10 koperasi dari 226 koperasi yang dinyatakan "sehat".

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti mengatakan, pelaksanaan uji kelayakan ini merupakan tindak lanjut dari Permenkop nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam koperasi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu persyaratan bagi anggota untuk dapat dipilih menjadi pengurus dan pengawas koperasi adalah memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

"Sekarang kami laksanakan uji kepatutan dan kepayakan bagi pengurus koperasi. Karena tidak serta milih mereka dipilih dan jadi, tapi diuji, dan itu sudah kita lakukan secara berkelanjutan," kata Krisni di sela-sela Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 77 di Lapangan Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Jumat (26/7/2024).

Pelaksanaan UKK di Kabupaten Pasuruan ternyata diacungi jempol oleh Pemprov Jatim. Kata Krisni, Kabupaten Pasuruan menjadi daerah paling aktif di Jawa Timur yang melaksanakan UKK. Sebab *output* kegiatan tersebut berupa surat pemberitahuan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pasuruan bahwa pengurus maupun pengawas direkomendasi atau tidak.

"Di Jawa Timur, Insya Allah kita paling gercep melaksanakan UKK karena memang outputnya sangat bagus," singkatnya.

Dengan uji kompetensi ini, Krisni berharap kepada para pengurus dan pengawas dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dan standar yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi secara efektif.

Selain itu, UKK juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. Khususnya demi tercapainya tujuan yang lebih baik bagi kesejahteraan anggota koperasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pentingnya bagaimana koperasi bisa dikelola oleh yang



Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan sudah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi pengurus dan pengawas koperasi.



Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto membuka acara secara resmi didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti.

kompeten karena ada ujiannya. Ada beberapa catatan dari kami setelah UKK, sehingga saran dan masukan kami langsung diamini pengurus dan pengawas untuk berusaha mencapai level yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto menitikpkan pesan penting untuk seluruh koperasi di Kabupaten Pasuruan. Yakni memahami bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian di Indonesia.

Oleh sebab itu, koperasi di jaman sekarang harus segera melakukan konsolidasi, akselerasi dan eskalasi agar perannya semakin strategis. Apalagi menjawab tantangan krisis dan bisa keluar dari *middle income trap*. Yakni suatu keadaan ketika negara/daerah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara/daerah maju.

"Peringatan ke-77 tahun Hari Koperasi kali ini, menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran koperasi semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian khususnya untuk mempercepat ikhtiar kebangsaan keluar dari 'middle income trap'," tegasnya. (emil)



Beras SPHP langsung ludes dibeli warga yang hadir.

## Warga Serbu Sembako Murah di Lapangan Desa Gayam

Ratusan warga menyerbu stand-stand pameran produk unggulan dan sembako di Lapangan Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Jumat (26/7/2024). Rata-rata, mereka ingin membeli beras SPHP, minyakita dan gula pasir yang dijual sedikit lebih murah dari harga di pasar pada umumnya.

Suntiya (42), salah satu warga Desa Gondangwetan mengaku membeli 4 sak beras SPHP yang dijual dalam kemasan 5 kilogram. Sebab harganya hanya Rp 56,500, dan kebetulan lebih murah dari beras yang dijual di Pasar Ranggeh.

"Selisih Rp 1 ribu, ya eman-eman mas, bisa buat beli garam," singkatnya.

Khusus beras SPHP, pihak Bulog menyediakan 1,5 ton. Sedangkan gula pasir yang dibawa sebanyak 250 kilogram, dan dijual dengan harga Rp 16.800.

Untuk Minyakita dibandrol dengan harga Rp 15 Ribu per botol alias satu liternya. Kemudian bawang merah Rp 20 ribu per 1 kg, Cabe besar Rp 24 ribu per kg, cabe rawit Rp 6 ribu per 1 ons, bawang putih sinco Rp 32 ribu per 1 kg, serta bawang putih kating Rp 35 ribu.

Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita



Ratusan warga menyerbu stand-stand pameran produk unggulan dan sembako di Lapangan Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan.

Rahayu menjelaskan, pameran produk unggulan dan sembako menjadi pelengkap Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 77.

Tujuannya tak lain untuk memudahkan warga dalam menjangkau sembako maupun produk unggulan khas Kabupaten Pasuruan dengan harga relatif lebih murah.

"Kebanyakan yang diserbu stand sembako, padahal banyak stand yang lain seperti makanan minuman, batik, bonsai, hingga kerajinan tangan dan layanan yang ada di beberapa OPD di Kabupaten Pasuruan," ucapnya.

Lebih lanjut Diana menegaskan bahwa pameran hanya digelar satu hari, dan antusiasme warga lumayan bagus.

"Banyak yang borong beras, gula pasir, minyakita dan sembako yang lain," tutupnya. (emil)



# Penjual Bendera Merah Putih Menjamur di Pasuruan

Meski masih belum memasuki bulan Agustus, sejumlah pedagang bendera merah putih sudah mulai menjamur di Pasuruan. Seperti yang terlihat di depan Mapolres Pasuruan, Jumat (26/7/2024) siang.

Eko (48) salah seorang penjual bendera mengaku sudah 9 tahun berjualan di Bangil. Padahal ia bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang jelas-jelas jaraknya sangat jauh dengan Pasuruan.

Ia beralasan setiap tahunnya selalu ketiban rejeki dengan berjualan atribut kemerdekaan. Dalam sehari, omset tak kurang dari Rp 1 juta selalu ia dapatkan dari berjualan bendera, mulai ukuran kecil sampai sepanjang 15 meter.

"Alhamdulillah, sudah sembilan tahun jualan di Pasuruan. Karena mungkin rejekinya di sini, jadi ketika bulan Juli, saya jualan di sini," ungkapnya.

Bendera yang Eko jual

dibandrol dengan harga bervariasi. Untuk ukuran panjang 1 meter dan lebar setengah meter, ia menjualnya dengan harga Rp 35 ribu. Bendera ukuran ini biasanya dipasang di depan rumah warga.

"Paling banyak ya bendera untuk di depan rumah, laku keras," singkatnya.

Sedangkan bendera lain yang dijual ada yang berukuran 2X1 meter dengan harga Rp 75 ribu. Kemudian bendera berukuran 5X1 meter seharga Rp 100 ribu, dan yang paling panjang 15x1 meter dijual dengan harga Rp 150 ribu - Rp 200 ribu.

Eko berharap banyak pembeli yang datang kepadanya, meski ia menyadari bahwa kebanyakan sudah banyak yang membeli via *online*.

"Sekarang jamannya *online*, Tapi saya gak menyerah, namanya juga nyari rejeki halal," ucapnya.

Sementara itu, salah satu warga, Effendi (32) mengaku membeli bendera berukuran 10X1 meter dengan harga yang sudah ia tawar Rp 115 ribu. Bendera itu akan ia pasang di depan gerbang perumahan di mana ia tinggal.

"Mau saya pasang di depan pintu masuk perumahan, ditambah dengan lampu hias nantinya," terangnya. (emil)



Bendera merah putih berkibar-kibar menunggu para pembeli.



Memasuki bulan Agustus, banyak warga yang berjualan bendera merah putih di samping jalan.



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, tepatnya ke Kurma Park Kecamatan Sukorejo.

# Menparekraf Sandiaga Uno Acungi Jempol Kurma Park Jadi Destinasi Wisata Halal Indonesia

Untuk kedua kalinya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Kali ini, Menteri yang juga seorang pengusaha itu berkunjung ke Kurma Park di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo untuk menghadiri acara "Diskusi Bareng Komunitas (Di BaTas)", Sabtu (27/7/2024).

Usai diskusi digelar, Sandiaga sempat berkeliling melihat bagaimana pengembangan wisata di Kurma Park. Menurutnya, Kurma Park hadir merupakan salah satu destinasi wisata edukasi agrowisata yang sangat menyenangkan. Sebab selain menghadirkan beragam tanaman kurma yang tumbuh subur, keberadaan Kurma Park juga menjadi sarana edukasi bagi para pelajar serta bertumbuhnya UKM maupun UMKM di sekitar tempat wisata.

"Saya melihat Kurma Park sebagai destinasi wisata yang lain daripada yang lain. Tumbuh pohon kurma dengan suburnya, dan

di sini juga dikembangkan produk olahan kurma yang semuanya halal," kata Sandiaga dalam keterangannya.

Sandi meyakini, Kurma Park bisa menjadi daya tarik wisata ramah Muslim yang dapat mendukung pengembangan wisata halal di Indonesia. Apalagi beberapa indikator sudah terpenuhi, mulai dari penyediaan fasilitas tambahan, atraksi hingga kemudahan akses bagi wisatawan muslim.

"Karena Destinasi wisata alam ini bukanlah zonasi, tapi ada tambahan layanan. Saya melihat di Kurma Park ini sudah ada, contohnya makanan halal, fasilitas ibadah juga sudah ada, toilet khusus wisatawan muslim yang ingin mensucikan diri, sudah memenuhi indikator wisata halal, meski belum semuanya," tandasnya.

Ditanya tentang pengembangan wisata halal atau ramah Muslim di Indonesia, Sandi menegaskan bahwa ada peluang yang cukup besar. Potensi ini dapat dilihat dari data BPS yang menjelaskan bahwa ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia atau sekitar 87,2 persen dari jumlah penduduk.

"Dan Indonesia sendiri telah menempati posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) dalam dua tahun berturut-turut, dan kita harus lengkapi terus, salah satunya dengan kehadiran Kurma Park," singkatnya.

Sementara itu, *Owner* Kurma Park, Rusti Widayati mengaku siap untuk menjadikan Kurma Park sebagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia.

Sebagai bentuk keseriusan, beberapa langkah sedang dilakukan, diantaranya pendekatan kepada ICMI dalam hal sertifikasi wisata halal, memperbanyak fasilitas pembelajaran melalui digitalisasi, penambahan spot pada paket edukasi religi manasik, hingga menambah sarana bantu bagi para wisatawan usia lanjut agar tetap bisa jalan-jalan di Kurma Park.

"Karena Kurma Park ini khan terlalu luas, akses orang tua agak cukup sulit, jadi ke depan akan ditambah seperti sarana penjemputan seperti e-bike atau transporter shuttle agar membantu wisatawan usia lanjut yang ingin jalan-jalan ke Kurma Park," ucapnya. (emil)





Cendono Karnival, ajang pameran kesenian dan budaya yang dibalut dalam bentuk parade di jalan raya.

# Belasan Tahun, Cendono Karnival Sukses Dilestarikan

Belasan tahun, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan terus mempertahankan Cendono Carnival, ajang pameran kesenian dan budaya yang dibalut dalam bentuk parade di jalan raya.

Acara tersebut dilaksanakan di Lapangan Desa Cendono, Minggu (28/7/2024) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa.

Kepala Desa Cendono, Sanari mengaku beberapa tahun sebelum dirinya menjabat Kepala Desa, Cendono Carnival sudah ada.

Hanya saja, ketika dirinya diberi amanah sebagai Kades pada 11 tahun lalu, Cendono Carnival perlahan dipercantik, khususnya tampilan para peserta.

"Dari desa mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 1 juta untuk masing-masing RT, sisanya silahkan swadaya sendiri," katanya.

Dalam karnaval tahun ini, total 16 RT diajak berpartisipasi. Mereka bebas untuk menentukan tampilan apa yang akan dipertontonkan selama karnaval.

Kata Sanari, seluruh peserta berkeliling ke penjuru desa dengan rute sejauh 10 kilometer, dan diiringi oleh parade sound system yang kini populer dengan istilah "Sound Horek".

"Setiap jalan raya di Desa Cendono kita putari biar warga ikut menyaksikan semua. Di belakangnya masing-masing peserta ada sound system horek sehingga makin ramai," jelasnya.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa mengapresiasi Desa Cendono yang terus mempertahankan Cendono Carnival sebagai *event* wajib yang dilaksanakan setiap tahun.

Menurutnya, tidaklah mudah untuk mempertahankan sebuah budaya yang diwariskan turun temurun.

"Sangat kami apresiasi karena Desa Cendono kompak dan berhasil menjadikannya sebagai *event* rutin. Apalagi ini kebetulan juga berdekatan dengan momen Kemerdekaan RI, jadi suasana nya tambah meriah," ucapnya.

Dengan suksesnya Cendono Carnival, Agus berharap kepada desa-desa lain supaya dapat menggali potensi yang dimiliki untuk selanjutnya diwujudkan dalam sebuah *event* yang bisa ditonton banyak orang.

"Karena saya yakin setiap desa punya mutiara nya sendiri-sendiri. Jadi mari kita gali sampai ketemi apa potensinya. Setelah itu baru kita bantu promosi" ungkapnya. (emil)



Acara tersebut dilaksanakan di Lapangan Desa Cendono dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa.



# Menyaksikan Dari Dekat "Ruwatan Tirta Amerta Sejatining Rogo" Kaliandra Sejati

Setelah 7 tahun vakum, Yayasan Kaliandra Sejati kembali menggelar Ruwatan. Ritual pembersihan diri dari hukuman atau kutukan yang membawa sial tersebut digelar di depan Rumah Kolonial yang berada di dalam Kawasan Kaliandra, Minggu (29/7/2024) sore.

Pantauan di lapangan, ritual ruwatan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, dan diawali dengan Kirab Rama Shinta beserta para tokoh adat yang terlibat dalam upacara. Barulah setelah semuanya tiba, acara dilanjutkan dengan ruwatan.

Atmadja Tjiptobiantoro selaku *Owner* Yayasan Kaliandra Sejati juga hadir dan ikut ambil bagian dari Ruwatan. Ada pula Wakapolres Pasuruan, Kopol Hari Azis; Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa, Muspika Kecamatan Prigen hingga ratusan warga sekitar yang antusias mengikuti satu persatu prosesi ruwatan mulai awal sampai selesai.

Manager Operasional Yayasan Kaliandra Sejati, Diyanto menjelaskan, dalam Ruwatan Tirta Amerta Sejatining Rogo kali ini, total ada 10 orang yang berpartisipasi. Dari jumlah tersebut, 3 orang diantaranya dari internal Kaliandra dan 7 lainnya adalah masyarakat umum.

"Padahal jauh-jauh hari sudah kami umumkan melalui Instagram, kemudian selebaran-selebaran dan promosi lainnya.



Ruwatan Tirta Amerta Sejatining Rogo digelar di depan Rumah Kolonial yang berada di dalam Kawasan Kaliandra Sejati.

Dan yang berpartisipasi hanya 7 orang dari masyarakat umum dan 3 orang dari Kaliandra sendiri," jelasnya.

Kebanyakan, para peserta Ruwatan adalah anak tunggal ataupun masyarakat yang menjaga teguh seluruh tradisi budaya jawa, salah satunya ruwatan.

Selama ruwatan, Kaliandra melibatkan 25 tokoh adat yang tergabung dari beberapa daerah seperti Malang, Blitar, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya dan Pasuruan. Harapannya, setelah ruwatan selesai, para peserta bisa lega dan merasakan sebuah energi yang baru, sehingga dapat beraktifitas dengan lebih semangat.

"Karena ruwatan itu membuang hal-hal yang menempel pada tubuh, baik sengaja maupun tidak. Dan begitu selesai diruwat, mudah-mudahan menjadi energi yang baru, dan efeknya semua aktifitas jadi lebih semangat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa mengapresiasi Kaliandra yang melestarikan tradisi Ruwatan sebagai budaya khas masyarakat Jawa.

"Harus kita apresiasi karena tetap mempertahankan budaya jawa meski kita hidup di era digitalisasi seperti sekarang ini," ucapnya.

Ke depan, Agus berharap kepada desa-desa maupun pihak lain yang memiliki kegiatan serupa, untuk segera dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nantinya, Dispar akan memfasilitasi dalam bentuk *event* maupun *support* lainnya.

"Bagi desa, kelurahan atau pihak lain yang menggelar ruwatan atau sedekah bumi atau budaya lainnya, segera dapat melapor ke kami, karena akan kami data dan *support event* pada mereka, sehingga gelaran yang dilakukan bisa kami *up* dan diketahui oleh publik," harapnya. (email)



Ritual ruwatan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, dan diawali dengan Kirab Rama Shinta beserta para tokoh adat yang terlibat dalam upacara.





Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Ny. Luhur Andriyanto demo masak olahan ikan.

## Konsumsi Ikan di Kabupaten Pasuruan Meningkat, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Gencar Kampanyekan Gemarikan di Setiap Wilayah Kabupaten Pasuruan

Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Kecamatan Kejayan, Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Ny. Luhur Andriyanto berharap masyarakat dapat meningkatkan konsumsi ikan regional dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan di Kabupaten Pasuruan yang cukup melimpah, baik ikan tangkap maupun ikan budidaya.

Ia menyampaikan bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan mulai mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu di angka 59,03 per Kilogram, per Kapita dalam satu tahun. Diharapkan masyarakat dapat terus meningkatkan jumlah konsumsi tersebut.

"Saya harapkan warga kecamatan kejayan angka konsumsinya ikut meningkat, dalam satu hari setidaknya ada satu menu ikan, bisa ikan lele, bandeng, mujaer, teri atau ikan yang

mudah kita dapatkan, karena semua jenis ikan itu memiliki kandungan gizi yang sangat bagus untuk tubuh" jelasnya.

Dilanjutkan, Ny. Luhur Andriyanto menyampaikan harga ikan yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan menjadi salah satu alasan kenapa harus mengonsumsi ikan. Maka dari ia menganjurkan seluruh masyarakat khususnya bagi para anak, ibu hamil dan calon pengantin untuk gemar mengonsumsi ikan.

“ Karena pada prinsipnya ketika mengonsumsi ikan nantinya dapat meningkatkan status gizi dan menurunkan angka stunting, sekaligus seorang ibu bisa melahirkan generasi yang cerdas, kuat dan sehat. sehingga anak dengan kualitas yang bagus diharapkan dapat menghadapi tantangan zaman ke depannya. ”

Di akhir, Ny. Luhur Andriyanto mengapresiasi atas penghargaan dan prestasi yang diraih oleh para ibu-ibu Kabupaten Pasuruan dalam lomba membuat kreasi menu balita berbasis ikan di tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai juara Favorit. Yang tidak lain berkat semangat dan antusias para ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan Kampanye Gemarikan di Kabupaten Pasuruan. Diharapkan masyarakat semakin menggencarkan gerakan makan ikan di setiap wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga harapan untuk mencapai Kabupaten Pasuruan zero stunting dapat segera terwujud. (R.A)



Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Kecamatan Kejayan.



# Setda Prov. Jatim Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Pengelolaan Komunikasi Pimpinan bagi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Prov. Jatim menyelenggarakan Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Pengelolaan Komunikasi Pimpinan bagi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur di The Malioboro Hotel and Conference Yogyakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, yakni hari Senin-Selasa (22-23/7/2024) dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Jatim, Akh. Jazuli dan diikuti oleh sebanyak 150 peserta Pejabat Fungsional Pranata dan Pejabat Pelaksana yang kehumasan serta komunikasi pimpinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Akh. Jazuli menyampaikan keberadaan humas memiliki peranan strategis bagi pemerintah daerah sebagai media pengelola informasi dan komunikasi pimpinan dan instansi pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang baik, benar dan objektif.



Bimtek ini diikuti oleh sebanyak 150 peserta Pejabat Fungsional Pranata dan Pejabat Pelaksana yang kehumasan serta komunikasi pimpinan di Kabupaten /Kota Jawa Timur.

"Kehumasan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bekerja dengan baik dan benar, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga informasi yang benar dapat tersampaikan ke masyarakat, karena sebaik apapun Kepala Daerah jika tidak disosialisasikan dan diberitahukan masyarakat tidak akan tahu" jelasnya.

Dilanjutkan, Akh. Jazuli melalui kegiatan bimtek ini diharapkan mampu mencapai hasil yang optimal, sekaligus menekankan kepada Humas Pemerintah Daerah mampu membangun sinergitas antar humas daerah, mengutamakan kolaborasi, serta mampu menciptakan sebuah inovasi atau pembaruan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Humas Pemerintahan harus mempunyai jiwa inisiatif dalam arti tidak menunggu diperintah, serta bagaimana bisa pick and give, menerima saran dan kritik dari orang lain yang berorientasi pada kepentingan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat" tegasnya.

Juga hadir narasumber Analis Kebijakan Ahli Utama Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur Sinarto, Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan, Founder dan CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa, dan Founder and Principal Consultant of NAGARU Communication dan Tenaga Ahli BNPT Republik Indonesia Dr. Dian Agustine Nuriman. (Robiatul)



Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Pengelolaan Komunikasi Pimpinan bagi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur di The Malioboro Hotel and Conference Yogyakarta.



# LPPL Radio Suara Pasuruan Kembali Toreh Prestasi di Tingkat Nasional sebagai Nomine Penghargaan Program Siaran Ramah Anak oleh KPI Pusat Tahun 2024

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan 107 FM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan kembali menoreh prestasi di Tingkat Nasional sebagai Nomine Lembaga Penyiaran Peduli Anak pada Anugerah Penyiaran Anak Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Kamis (25/7/2024).

Bertempat di Auditorium LPP TVRI Jakarta, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada lima Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) terbaik di antaranya Radio Suara Pasuruan, Radio ERTE FM Temanggung, Radio Gema Bungo FM Jambi, Radio RPKB FM Bangli, dan Radio Suara Madiun.

Dalam Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak, Radio Suara Pasuruan harus bersaing dengan LPPL seluruh Indonesia serta harus melengkapi beberapa persyaratan yang ditentukan KPI Pusat. Yakni memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Profil LPPL, serta Program Ramah Anak yang berkelanjutan.

Diketahui, Radio Suara Pasuruan 107 FM mempunyai program khusus Anak yakni "Panggung Gembira" yang dilaksanakan setiap hari Sabtu Pagi mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dengan menggandeng para anak TK dan RA Se-Kabupaten Pasuruan. Dalam program tersebut anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan siaran dengan materi pembelajaran dasar seperti Pembacaan doa-doa, menyanyikan lagu-lagu Islami, Lagu Nasional, Edukasi Kebhinekaan hingga cerita tentang kisah para Nabi.

Atas capaian tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada LPPL Radio Suara Pasuruan sebagai nomine program penyiaran Ramah Anak 2024. dan menjadi motivasi baru bagi para penyiar untuk terus berinovasi dalam memberikan program-program terbaik ke depannya "Tentunya ini adalah sebuah prestasi, tetap semangat dan terus berinovasi" ungkapnya

Sesuai dengan motto Radio Suara Pasuruan "Tiada Henti Menginspirasi". Koordinator Program Radio Suara Pasuruan, Sofia Yuniarti menyampaikan akan terus berupaya menginspirasi masyarakat melalui program siaran inspiratif untuk masyarakat "Suara Pasuruan, untuk generasi emas" ucapnya.

LPPL Radio Suara Pasuruan sebelumnya juga pernah mendapatkan dua penghargaan dari KPID Provinsi Jawa Timur sebagai radio yang ikut dalam pembentukan karakter dan mengedukasi anak lewat program siaran "Panggung Gembira" dan "Dongeng Nabi Ismail AS" dalam rangka memperingati hari anak Nasional Tahun 2023. (R.A)



LPPL Radio Suara Pasuruan kembali toreh prestasi di Tingkat Nasional sebagai Nomine Penghargaan Program Siaran Ramah Anak oleh KPI Pusat Tahun 2024.

# Kabupaten Pasuruan Dinyatakan 100 Persen ODF

Per 25 Juni 2024 lalu, Kabupaten Pasuruan sudah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh desa/kelurahan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto di sela-sela *zoom meeting* dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pasuruan di Command Center Kabupaten Pasuruan, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, Kabupaten Pasuruan dinyatakan 100 %ODF setelah verifikasi Tim Penilai dari Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Saat verifikasi, semua persyaratan sebuah daerah untuk menuju ODF sudah dilengkapi Pemkab Pasuruan. Termasuk program jambanisasi, kampanye perilaku hidup sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) hingga perilaku masyarakat ditambah tatanan yang diterapkan di tempat ibadah, sekolah dan tempat lain yang sesuai kriteria ODF.

"Alhamdulillah sejak akhir Juni lalu, tepatnya tanggal 25 Juni, Kabupaten Pasuruan sudah dinyatakan 100 Persen ODF. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan Kabupaten Pasuruan bebas buang air besar sembarangan," katanya.

Menurut Andriyanto, dalam dua tahun terakhir dari 2022 ke 2023, jumlah Desa ODF di Kabupaten Pasuruan terus bertambah dari 151 desa menjadi 194 desa. Dan sisanya diselesaikan di tahun ini dengan banyak program, kegiatan dan perjuangan yang luar biasa.

Namun semua itu terbayar dengan kondisi Kabupaten Pasuruan yang lebih bersih tanpa ada lagi pemandangan

jamban helikopter maupun warga yang masih saja BAB (buang air besar) di Sungai atau di sembarang tempat.

"Semua camat, kades dan lurah kita mintai tanda tangan pakta integritas. Isinya tentang komitmen menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat," jelasnya.

Tak hanya para camat hingga kepala desa, Andri menegaskan bahwa untuk bisa mencapai 100% ODF, seluruh elemen masyarakat harus bersinergi. Perihal ODF, masyarakat tidak harus mempunyai WC. Bahkan mereka yang tidak mempunyai lahan untuk membuat WC bisa menggunakan fasilitas WC atau Jamban yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun desa.

"Jadi ini komitmen semua yang ada di desa/ kelurahan dan kecamatan. Tentunya mereka tidak bisa kerja sendiri. Semua harus bersinergi untuk mendorong agar masyarakatnya bisa BAB ditempat jamban yang sehat," ucapnya.

Lebih lanjut Andriyanto menegaskan bahwa banyak OPD terkait juga memiliki program dan anggaran yang melekat dalam rangka mendukung ODF.

Seperti contoh program Jambanisasi yang pembangunannya melalui Dinas Perkim. Kemudian Dinas Kesehatan yang lebih fokus pada upaya menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan OPD lainnya.

"Karena anggaran melekat ke semua OPD, jadi tergantung intervensinya seperti apa. Katakanlah jambanisasi ya Dinas Perkim, masalah ajakan untuk PHBS ya Dinkes," harapnya. (emil)



Kabupaten Pasuruan sudah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh desa/kelurahan.



Dalam dua tahun terakhir dari 2022 ke 2023, jumlah Desa ODF di Kabupaten Pasuruan terus bertambah dari 151 desa menjadi 194 desa.





Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan 2024.

# Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan 2024

Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Penghargaan "Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan " kepada Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto. Penghargaan ini diberikan kepada Pj. Bupati Pasuruan yang telah membina dan mengukuhkan desa-desa/kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH).

Pantauan di lapangan, penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum kepada Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto pada acara Peresmian dan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Singhasari Resort, Kota Batu, Selasa (30/7/2024) pagi.

Selain Pj. Bupati Andriyanto, dua desa dan satu kelurahan



Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfian Nurul Huda juga menerima penghargaan atas 'Peran Aktif dalam Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum'.

juga menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan. Yakni Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari; Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan serta Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi. Tak ketinggalan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfian Nurul Huda juga menerima penghargaan atas 'Peran Aktif dalam Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum'.

Usai penganugerahan selesai dilaksanakan, Andriyanto berucap syukur. Sebab jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Pasuruan terus bertambah. Dimana sampai saat ini sudah ada 44 desa dan 1 kelurahan yang sudah dikategorikan sadar hukum. Sehingga pembinaan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di wilayah tersebut telah dilakukan secara optimal.

"Dampaknya banyak, antara lain kriminalitas semakin berkurang bahkan bisa terus ditekan sampai nol kejadian. Penyelesaian hukum kalau ada masalah yang menyangkut warga bisa cepat terselesaikan. Ini salah satu contoh indikator des/kelurahan sadar hukum yang sudah kami SK-kan," katanya.

Ke depan, Andriyanto berharap jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Pasuruan terus bertambah. Apalagi banyak hal positif yang tercipta ketika desa/kelurahan sudah sadar hukum. Yakni peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum, serta pemahaman tata cara penyelesaian perkara-perkara hukum di masyarakat melalui musyawarah alias *win win solution*.

"Mari kita tingkatkan belajar dan berdiskusi tentang hukum. Semakin banyak desa dan kelurahan sadar hukum maka apapun permasalahan hukum yang menimpa masyarakat bisa cepat selesai dengan musyawarah, kekeluargaan dan apapun yang ujungnya adalah *win win solution*," harapnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfian Nurul Huda menjelaskan, dalam prosesnya, DKSH harus diawali dengan adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Yakni sebuah wadah yang berfungsi menghimpun warga yang dengan kemauannya sendiri, berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Setelah terbentuk Kadarkum, maka kemudian dibina oleh Pembina Kadarkum Tingkat Pusat dan Pembina Kadarkum Tingkat Daerah. Dari situ, Kelompok Kadarkum yang telah dibina kemudian ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

"Prosesnya memang cukup panjang. Desa atau kelurahan itu diusulkan oleh Camat kepada Bupati/Walikota. Kemudian, Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan," jelasnya.

Tahun 2025 mendatang, pihaknya menargetkan tambahan 10 desa/kelurahan sadar hukum yang akan dibina.

"Mudah-mudahan 10 desa/kelurahan tambahan bisa kita bentuk di tahun 2025," singkatnya. (emil)

# Sekda Yudha Triwidya Sasongko Yakin Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan Meningkat

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rakor tersebut digelar di Hotel Ascent Premierre, Selasa (30/7/2024) dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko. Sedangkan para pesertanya adalah seluruh Kepala OPD maupun staf di bawahnya yang membidangi urusan SPBE.

Kepala Diskominfo Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut tak lain untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

Terlebih SPBE bukan semata-mata menjadi tupoksi utama Dinas Kominfo. Melainkan kolaborasi, sinergitas dan koordinasi seluruh OPD sehingga indeks SPBE semakin meningkat di setiap tahunnya.

"Intinya adalah keterpaduan layanan publik melalui SPBE. Semua OPD kami undang untuk menyamakan persepsi bahwa SPBE ini bukan tanggung jawab Kominfo seutuhnya. Tapi ada sinergitas, koordinasi dan kolaborasi semua OPD yang ujungnya adalah indeks SPBE yang kita harapkan terus meningkat," katanya.

Untuk semakin menambah literasi SPBE bagi para peserta, Diskominfo juga menghadirkan Umar Affandi selaku Data and Business Intelligence Expert dari Inixindo Jogjakarta.

Kata Harris, diharapkan peran aktif semua peserta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bertanya sebanyak-banyaknya tentang digitalisasi dalam pelaksanaan SPBE.

"Tadi lumayan banyak yang bertanya. Karena memang ini yang kita inginkan. Supaya semua pertanyaan bisa terjawab," singkatnya.

Sementara itu, Sekda Yudha menegaskan bahwa SPBE tidak sekadar untuk mengukur maturity level alias tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang

direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Lebih dari itu, penerapan SPBE harus memiliki dampak bagi masyarakat maupun pada sektor pelayanan publik.

"Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan SPBE dan perbaikan yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak demi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik," jelasnya.

Di akhir sambutannya, mantan Kadispendukcapil ini menyampaikan harapannya terhadap indeks SPBE tahun 2024 agar terus meningkat. Sebab indeks SPBE Kabupaten Pasuruan berada di angka 2,47 yang artinya cukup.

"Karena hasil evaluasi SPBE Pemprov Jatim tahun 2023, Indeks SPBE kita masih rendah. Sehingga harus kita tingkatkan supaya terus naik, meskipun nilai tinggi itu bukan tolak ukur satu-satunya. Namun yang terpenting adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel," tutupnya. (email)



Sebagai narasumber, Diskominfo juga menghadirkan Umar Affandi selaku Data and Business Intelligence Expert dari Inixindo Jogjakarta.



Rakor SPBE dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko.



# Dinyatakan 100% ODF, Pj Bupati Pasuruan Andriyanto Optimis Kabupaten Pasuruan Jadi Kabupaten Sehat dan STBM Award

Tim Verifikator Provinsi Jawa Timur selesai melakukan kunjungan sekaligus penilaian ke sejumlah desa/kelurahan hingga fasilitas publik yang mendukung Kabupaten Pasuruan 100% ODF (Open Defecation Free).

Sejak Selasa (30/7/2024) kemarin, seluruh Tim Verifikator berkeliling secara sampling dan menyasar beberapa sarana prasarana pendidikan, baik sekolah maupun pondok pesantren.

Selain itu, beberapa desa dan kelurahan juga disasar untuk memastikan tak ada aktifitas buang air besar sembarangan (BABS) maupun kegiatan warga yang dapat mengotori sungai.

Dan hasilnya, Kabupaten Pasuruan Layak 100% ODF.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kami nyatakan Kabupaten Pasuruan layak 100 persen ODF yang ke 34 di Jawa Timur," ucap Sulvi Dwi Anggraini selaku Ketua Tim Verifikator Propinsi Jawa Timur usai rapat pleno penetapan Kabupaten Pasuruan layak ODF di Gedung Segoropuro, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, secara umum status masyarakat yang masih BAB sembarangan sudah dinyatakan tidak ada. Khususnya di 8 kecamatan yang menjadi lokasi penilaian.

Selain itu, sebagian besar sarana yang digunakan oleh masyarakat masuk kategori layak sebesar 86,75% dan sebagian lagi masuk kategori akses aman sebesar 13,25%. Ditambah sebagian desa lokasi sampling sudah menerapkan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

"Indikator utamanya dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang masih BAB sembarangan. Namun sanitasi itu tidak cukup dinyatakan layak saja. Tapi harus ditingkatkan menjadi sanitasi yang aman," imbuh Sulvi.

Sebagai bahan rekomendasi, Tim Verifikator berharap kepada Pemkab Pasuruan untuk mensosialisasikan regulasi terkait perilaku *Stop BABS* secara massif.

Tak hanya itu saja, tim menurut Sulvi menghimbau kepada warga agar rutin melakukan pengurasan *septic tank* secara berkala minimal 3-5 tahun melalui Surat Edaran Kepala Daerah;



Tim Verifikator Propinsi Jawa Timur menyerahkan penghargaan Kabupaten Pasuruan Layak 100% ODF kepada Pj. Bupati Pasuruan.

serta mempertimbangkan kerja sama antar kota/kabupaten terkait pembuangan lumpur tinja yang sudah disodot di wilayah Kabupaten Pasuruan.

"Pesannya, ada tindak lanjut dari rekomendasi yang kami berikan agar Kabupaten Pasuruan semakin sehat, aman dan nyaman untuk masyarakatnya," tandasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto mengucapkan syukur setelah Tim Verifikator Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Kabupaten Pasuruan dinyatakan 100 persen bebas BABS.

"Hari ini menjadi momen luar biasa bagi Kabupaten Pasuruan. Karena oleh Tim Verifikator, Kabupaten Pasuruan dinyatakan 100 persen bebas BAB sembarangan," ungkapnya usai deklarasi ODF di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti.

Ke depan, Andriyanto mengajak seluruh pihak untuk sama-sama ikut menjaga perilaku hidup bersih dan sehat demi mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai Kabupaten Sehat.

"Karena ke depan kita mengajukan untuk menuju Kabupaten Sehat dan STBM Award. Saya tegaskan bahwa ini bukan masalah penandatanganan sertifikat atau pakta integritas ataupun pembubuhan tanda tangan hitam di atas putih saja. Tapi bagaimana bisa merubah perilaku yang awalnya masih BABS kemudian menjadi BAB di jamban sehat atau WC, itulah yang susah. Dan akhirnya Kabupaten Pasuruan jadi sehat dan sanitasi aman," harapnya. (email)



Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto Optimis Kabupaten Pasuruan Jadi Kabupaten Sehat.



Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Skala Kabupaten Pasuruan.

## DLH Kabupaten Pasuruan Gelar Geladi Kedaruratan dan Simulasi Penanganan Limbah B3

Potensi terpapar bencana Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di suatu daerah padat industri, besar kemungkinan terjadi jikalau tidak diantisipasi.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Skala Kabupaten Pasuruan, di Lapangan Yayasan Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Sambirejo, Kecamatan Rejos, Selasa (30/7/2024).

Pantauan di lokasi, geladi tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan, Hasbullah. Sedangkan pesertanya terdiri dari perwakilan perusahaan, TNI, POLRI, karang taruna, sekolah hingga beberapa staf OPD terkait.

Menariknya, dalam geladi itu ditampilkan simulasi pengolahan maupun penanganan limbah B3 yang dilakukan oleh DLH serta berbagai unsur pemerintah maupun swasta. Diantaranya BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, POLRI, serta dua perusahaan pengolah limbah B3, yakni PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan PT Dowa Eco System Indonesia (DESI).

Menurut Hasbullah, di Kabupaten Pasuruan tercatat ada sekitar 1464 perusahaan yang memproduksi. Dari jumlah

tersebut, potensi penggunaan B3 maupun timbulan limbah B3 di Kabupaten Pasuruan lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah tetanggainya.

Untuk itu, apabila pengelolaan B3 maupun limbahnya tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan, keselamatan manusia, rusaknya ekosistem hingga resiko kedaruratan lainnya.

"Kejadian kedaruratan ini bisa dicegah melalui penerapan sistem. Tapi sebisa mungkin yang wajib dilakukan adalah antisipasi sedini mungkin supaya tidak terjadi pencemaran limbah B3," katanya.

Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghony menegaskan bahwa Geladi Kedaruratan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam

penerapan dokumen kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3.

"Penyelenggaraan geladi kedaruratan pengelolaan B3 maupun Limbah B3 untuk skala kabupaten wajib dilakukan satu kali dalam dua tahun. Tapi kalau skala nasional bisa satu kali dalam empat tahun," jelasnya.

Lebih lanjut Ghony menyampaikan bahwa Kabupaten Pasuruan termasuk dalam 10 pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menyusun dokumen program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3.

Oleh sebab itu, dengan digelarnya geladi kedaruratan, diharapkan seluruh pihak mampu meningkatkan *sense of awareness*. Yaitu kesadaran dari masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah akan pentingnya penanggulangan keadaan darurat yang disebabkan oleh pencemaran limbah B3.

"Kalau sudah terbangun, maka *sense of preparedness* atau kesiapan rancangan penanggulangan keadaan darurat kebencanaan teknologi yang diakibatkan aktifitas pengelolaan B3 dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha, akan terus terjaga," harapnya.

Sementara itu, Arum Tri Pusposari selaku Humas PT PPLI menerangkan bahwa geladi kedaruratan merupakan kolaborasi dari dunia industri di Kabupaten Pasuruan yang dimotori oleh DLH.

Seluruh pihak menyatakan dukungannya untuk membantu pemerintah dalam menghadapi situasi kedaruratan pencemaran limbah B3.

"Kami sering diminta bantuan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran akibat B3 seperti tumpahan minyak di laut atau kebocoran B3 yang berpotensi mencemari lingkungan," ungkapnya.

Seperti diketahui, PPLI sendiri merupakan perusahaan pengolah limbah industri yang sudah lebih dari 30 tahun beroperasi di Indonesia dan berpusat di Cileungsi Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan DESI adalah perusahaan sister company dari PPLI yang beroperasi di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya memiliki satu holding company yang sama, DOWA Ecosystem, Co.Ltd yang sudah lebih dari 100 tahun fokus dalam industri pengolahan limbah B3 di Jepang. (emil)





## Ajak Siswa Bijak Dalam Bermedia Sosial, Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan Lakukan Sosialisasi di SMP Negeri 2 Sukorejo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan melakukan Sosialisasi "Cakap Digital, Bijak Bermedia Sosial" di SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Selasa (30/7/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Sukorejo yang di ikuti oleh ratusan siswa atau siswi mulai dari kelas VII hingga kelas IX, dengan Narasumber Diah Bayu Ratna selaku Pejabat Fungsional, Pranata Humas Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan serta para guru SMPN 2 Sukorejo yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMPN 2 Sukorejo, Jasmak menyampaikan tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa/siswi dalam mengelola media sosial dengan baik dan benar, khususnya di era digitalisasi seperti saat ini.

"Media sosial ini ibarat dua mata pisau, dapat digunakan untuk hal positif maupun hal negatif, maka dari itu melalui kegiatan ini anak-anak bisa memahami tentang media sosial, dan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan positif" ujarnya.

Jasmak mengatakan kegiatan ini bukan pertama kali

dilakukan, melainkan sosialisasi juga sering dilakukan melalui beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah SMPN 2 Sukorejo. "Sosialisasi sering kita lakukan seperti saat pelaksanaan upacara, agenda pertemuan dengan wali murid, termasuk mendatangkan narasumber dari luar seperti saat ini" ungkapnya

Selain itu, upaya sekolah dalam memberikan pemahaman digitalisasi juga dilakukan dengan menunjang sarana dan prasarana sekolah dengan fasilitas pembelajaran berbasis digital. "Untuk pembelajaran setiap hari, bapak/ibu kami dorong dengan penggunaan sistem digital, mulai dari presensi siswa, jurnal guru, dan media pembelajaran lainnya, dan hampir di setiap kelas kita ada LCD proyektor" jelasnya.

Sementara itu, narasumber Pejabat Fungsional Pranata Humas Pemerintah, Diah Bayu Ratna dalam paparan materinya tentang bijak dalam bermedia sosial mengajak para siswa agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan penggunaan media sosial, mulai dari memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif yang timbulkan, serta ancaman pidana dalam penyalahgunaan media sosial yang tertuang dalam undang-undang ITE. (Robiatul)



# TOBACCO, THE "GREEN GOLD" FROM INDONESIA

When we hear the word tobacco, it will immediately go to cigarettes. It is true that one of the basic ingredients for making cigarettes is tobacco. However, did you know? Apart from cigarettes, it turns out that tobacco is also used in scientific fields, such as genetics, phytopathology, photosynthesis, nutrition, plant growth, and even has the potential to be used as an ingredient in medicines.

Tobacco is a seasonal agricultural product, not a food commodity, but a plantation commodity. Tobacco is a type of dwarf plant with the Latin name *Nicotiana Tabacum*. In Indonesia, the famous tobacco is Virginia tobacco. Tobacco is a commercial crop because it has contributed a very large amount of foreign exchange to the country both from exports and types of cigarette products, excise deposits and other tax payments or in terms of employment in the industry.

In Pasuruan Regency, tobacco plants have a planting area of 177 ha with production in the chopped form of 3,125 kg and productivity of 168 kg/ha, the largest in Kejayan, Pasrepan and Puspod Districts.

For farmers, tobacco plants are "green gold" that cannot be replaced in the dry season. Growing tobacco is much more profitable than growing secondary crops or rice which require a lot of water.

Tobacco contains tar, nicotine, CO gas and NO. Almost every part of tobacco, except the seeds, contains nicotine in varying amounts depending on the plant species, the type of soil where it grows, and the climate where the tobacco is grown. Here are some of the benefits of tobacco for our bodies:

## 1. Herbal Medicine

Medical experts have experimented a lot with tobacco as a herbal medicine. Tobacco is said to be able to treat various diseases, such as pain, constipation, gout, convulsions, poisoning from reptile insect bites and venomous insects.



Even tobacco can act as a respiratory stimulant. Nicotine, the main ingredient in tobacco, has been proven to be an effective drug to cure several health problems. However, in the end medical experts removed tobacco as a medicine because tobacco use did more harm than good.

## 2. Relieves Allergies

Have you ever felt itching due to allergies and mild pain? Tobacco leaf poultices can be applied to the skin to help reduce itching and mild pain. Tobacco nicotine is responsible for removing allergens on the skin and returning the skin to normal function.

## 3. Accelerate Vaccine Production

In the process of making vaccines, tobacco use will become increasingly widespread. Tobacco contains antigens comparable to the Influenza virus, making it a potential vaccine. When compared with the original Influenza virus which takes one month to produce a vaccine. The method of making vaccines using antigens from tobacco will be faster.

## 4. As A Source of Vegetable Protein

Agronomists and scientists agree that *Tabacum Nicotiana* tobacco can be used as a source of high vegetable protein. Tobacco can be easily processed to make proteins that are used by humans, animal feed, insecticides and cosmetic ingredients.

## 5. Can Be Used for the Phytoremediation Process

Phytoremediation is an effort to use plants and related materials to clean up waste and environmental pollution problems. This method can clean chemically damaged soil, air and water and contaminated ecosystems can be repaired using plants.

So, tobacco is basically very useful for the health of the body and the surrounding environment. It depends on how we manage and utilize tobacco. (dgp)





# Photo of This Week



BATIK KURMA



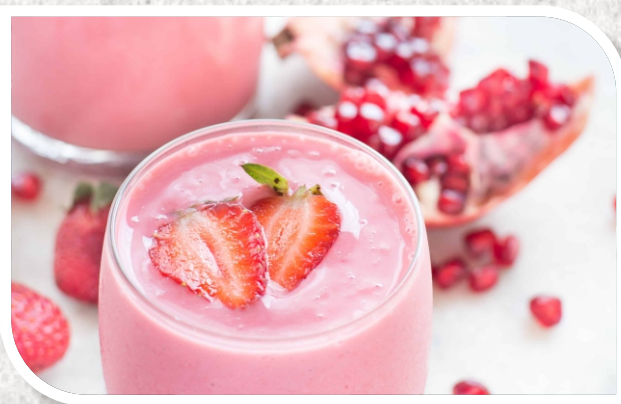
PARA PENDAMPING



AWAS



CULTURE



STRAWBERRY SMOOTHIES



NYANYI YUK





PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN



LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL

# RADIO SUARA PASURUAN FM 107



MUSIC HITS INFORMATION ENTERTAINMENT

suarapasuruan

suarapasuruan107fm

suara pasuruan

suarapasuruan107@gmail.com